

EDISI : senin, 11 Maret 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media :

BALI POST

Kategori :

Bandara

Bukit Teletabis Konon Dijadikan Proyek Bandara

# KPDK Pasang Spanduk "Awig-awig" di Lokasi

Singaraja (Bali Post) -

Sejumlah warga mengatasnamakan Komunitas Pemerhati Desa Kubutambahan (KPDK), Minggu (10/3) kemarin melakukan aksi pemasangan spanduk di kawasan Bukit Teletabis. Konon, bukit itu akan dijadikan lokasi proyek Bandar Udara (Bandara) Internasional Bali Utara. Pemasangan spanduk ini diduga berkaitan rencana pemanfaatan lahan Desa Pakraman Kubutambahan di Bukit Teletabis untuk dibangun bandara.

Pantauan di lapangan, spanduk yang dipasang itu berukuran sekitar tiga kali satu meter. Lokasi pemasangannya tidak jauh dari sebuah bangunan warung yang biasa ramai dipadati pengunjung Bukit Teletabis. Tulisan di lembar sepanduk itu, berbunyi "Awig Desa Kubutambahan Tahun 1990. Pasal 5 Krama Desa terdiri dari 1, Krama Desa Negak, 2 Krama Desa Lattan, dan 3, Krama Desa Sampingan. Pasal 23 berbunyi Tanah abian tegal hak milik Desa Adat Kubutambahan seluas 415, 895 hektar. Pasal 25 berbunyi tidak diizinkan menjual atau mengesahkan tanah hak milik adat, kalau tidak dapat persetujuan krama desa".

Sebelum dipasang, perwakilan KPDK Ketut Arcana Dangin bersama Gede Kastawan menjelaskan secara panjang lebar terkait aksi pemasangan spanduk itu, kepada Camat Kubutambahan

Made Suyasa dan Kapolsek AKP Made Mustida serta pecalang yang sudah lebih dahulu hadir di lokasi bandara itu. Suasana sempat tegang karena *prajuru* itu tidak menginginkan pemasangan spanduk itu. Sebab, diduga bernuansa provokatif kepada warga. Namun, perwakilan KPDK kemudian diizinkan memasang sepanduk yang dibawanya itu. Setelah dipasang sekitar 15 menit, spanduk itu diturunkan anggota pecalang dan polisi. Usai penurunan spanduk itu, KPDK dan aparat terkait kemudian melanjutkan pertemuan di Pura Desa Pakraman Kubutambahan. Pertemuan dipimpin Kelian Desa Adat Kubutambahan Jero Pasek Warkadea.

Camat Kubutambahan Made Suyasa menyarankan perwakilan KPDK dan desa pakraman agar bicara dari hati ke hati. Apalagi baru saja usai merayakan hari Nyepi, sehingga pihaknya mengajak

bersama-sama menjaga situasi wilayah tetap kondusif dan harmonis.

Ketua KPDK Ketut Arcana Dangin mengatakan, alasan mengapa pihaknya memasang spanduk Awig-awig Desa Adat di Bukit Teletabis agar diketahui komponen masyarakat. Dirinya memastikan kalau aksi pemasangan spanduk itu, tidak ada kepentingan pribadi. Apalagi dianggap provokator. Aksi itu dilakukan karena dari pengamatannya selama ini belum banyak masyarakat Kubutambahan yang mengetahui isi *awig-awig* yang disahkan tahun 1990 lalu itu.

Klian Desa Pakraman Kubutambahan Ketut Warkadea mengatakan, pemasangan spanduk itu, seharusnya dilakukan lebih elegan dan momen yang tepat. Ini karena, wacana pemerintah pusat membangun bandara sudah mendekati kenyataan. Aksi pemasangan spanduk itu

Kategori : *Sampul*



Bali Post/kmb38

**SPANDUK** – *Sejumlah warga mengatasnamakan Forum Pemerhati Desa Kubutambahan (KPKD) melakukan aksi pemasangan spanduk di Bukit Teletabis, Minggu (10/3) kemarin. Di sana konon akan dibangun bandara.*

apalagi di lokasi yang sedang dikaji untuk lokasi bandara, kalau aksi itu dibiarkan, dirinya khawatir ada dampak tidak baik ke depannya. Terkait isi *awig-awig* yang belum diketahui masyarakat, Warkadea menyatakan, desa pakraman tidak akan menjual tanah kepada investor yang membangun bandara. Melainkan, desa pakraman sendiri akan memasukan assetnya sebagai penyertaan modal dalam investasi bandara itu. Dengan pola ini,

desa pakraman mendapat keuntungan. Selain dari penyertaan modal juga ada kontribusi lain setelah bandara terbangun dan beroperasi. Terkait pemerataan modal itu, Warkadea memastikan agar disosialisasikan pemerintah kepada semua elemen masyarakat. Pihaknya mempersilakan saat sosialisasi itu warga wajib hadir dan meminta penjelasan terkait proyek bandara dan lahan yang akan dimanfaatkan. (kmb38)

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *BUMDes*

## Kelola Hutan Desa, Usulkan Bentuk BUMDes Bersama

Potensi hutan desa di Buleleng belum dikelola maksimal. Karena itu wajar, belum bisa menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD) Padahal, sejatinya hal itu bisa menjadi sumber PAD. Karena jika diupayakan pengelolaan hutan desa itu secara optimal, maka dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu, bagaimanakah solusi pengelolaan hutan desa secara efektif sehingga potensial meningkatkan PAD itu?

DARI data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), luas hutan desa di Buleleng mencapai 7.000 hektar. Hutan itu tersebar di Kecamatan Tejakula, Sukasada, Sawan, Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu. Kepala Dinas PMD Made Subur mengatakan, hutan desa itu memang harus dikelola maksimal. Solusinya, desa itu disarankan segera

membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama. BUMDes Bersama ini sebagai wujud kerja sama antardesa untuk mengolah hasil hutan desa. Dicontohkan, hutan desa di wilayah Kecamatan Sukasada itu dijadikan *pilot project* strategi. Nantinya, ada sejumlah desa dilibatkan dalam pengelolaan hutan desa seluas 1.300 hektar di Sukasada. Di antaranya Desa

Panji, Desa Sambangan, Desa Selat, Desa Ambengan, dan Desa Wanagiri. Agar ketersediaan sumber mata air itu tetap lestari maka pihaknya meminta masyarakat yang memiliki hutan desa itu wajib membudidayakan tanaman keras sesuai topografinya. Sehingga hasil hutan itu tetap dapat dinikmati tanpa harus merusak lingkungan. "Kami akan membentuk BUMDes Bersama. BUMDes ini akan memanagerial tata kelola air, objek wisata hutan desa termasuk budi daya buah lokal di areal seluas 1.300 hektar ini. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan desa ini," katanya.

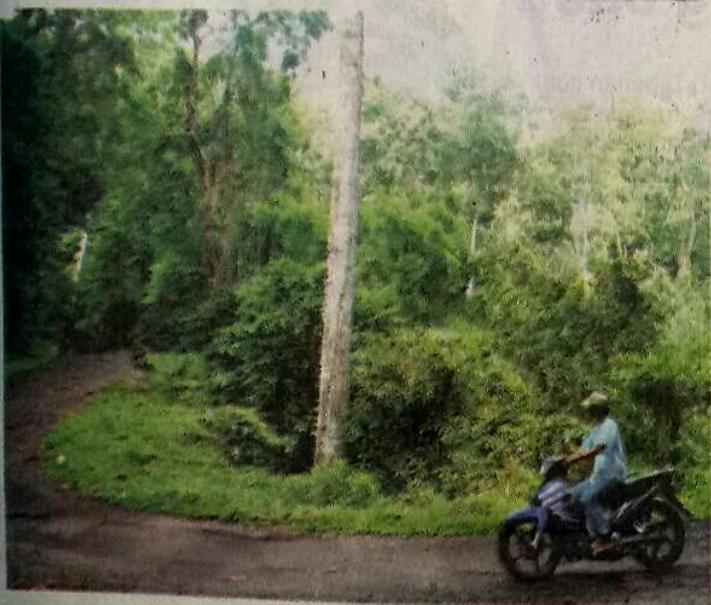
Beberapa jenis tanaman

yang direkomendasikan ditanam di areal hutan desa itu, kata Subur, seperti kopi, kelapa, durian, avokad, bambu, kayu gaharu, hingga tanaman obat yang berkaitan *usadha* Bali. Budi daya tanaman keras ini, juga diharapkan mendukung program "Bumi Banten" yang dicanangkan, sehingga tetap dapat memenuhi keperluan desa pakraman akan sarana *upakara yadnya*.

Pemanfaatan hutan desa itu diklaim sejalan dengan visi Gubernur Bali "Nangun Sat Kertih Loka Bali". Sebab, pemanfaatan hutan desa itu dinilai dapat melestarikan hutan (*wana kertih-red*) dan upaya menjaga kelestarian sumber air (*danu kertih*

*-red*). "Jadi, hasil hutannya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal itulah bisa menambah PAD. Begitu juga pemenuhan sarana *upakara* yang bisa diambil dari Bumi Banten di hutan desa ini," tegasnya.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya mengundang perangkat desa dinas dan desa pakraman dan tokoh-tokoh masyarakat dari desa yang akan mengelola hutan desa untuk mengikuti sosialisasi. Setelah mendapat kepercayaan dan izin pemanfaatan dari pemerintah pusat, maka desa dinas dan desa pakraman diharapkan bersinergi dalam mengelola hutan desa, sehingga tetap terjaga kelestariannya. (*mud*)



Bali Post/kmb38

HUTAN DESA - Dinas PMD Buleleng mendorong pengelolaan potensi hutan desa. Hutan di Desa Selat, Sukasada potensial dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Media : BALI POST

Kategori : UMKM

## Minim, Minat Pelaku UMKM Cari Hak Paten Dari 2.000 UMKM, Hanya Satu-Dua yang Mengurus

**Singaraja (Bali Post) –**

Minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Buleleng mengurus izin hak paten bisa dibilang minim. Ini terbukti dari sekitar 2.000 pelaku UMKM di Bali Utara, sampai tahun ini, hanya satu-dua yang sadar mengurus hak paten untuk melindungi desain atau produknya dari pengakuan pihak lain di luar daerah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Koperasi-UKM) Buleleng Nyoman Swatantra didampingi Kabid UKM Wayan Biasari akhir pekan lalu, tidak menampik kalau sebagian besar desain atau produk UKM dari Denpasar belum mengantongi hak paten. Mantan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Buleleng ini mengatakan, pemerintah daerah belakangan ini gencar menyosialisasikan terkait tahapan dan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan hak paten dari pemerintah itu. Melalui berbagai kegiatan, pihaknya menyadarkan setiap pelaku UKM di daerah ini, pentingnya setiap desain dan produk yang diciptakan itu dilindungi hak paten. Dengan hak paten itu, kalau ada pihak lain yang membuat desain atau produk sama, maka pemegang hak paten itu berhak mendapatkan royalti.

Selain itu, dengan hak paten itu, pembajakan terhadap suatu desain atau produk UKM itu dapat dicegah. Alur mendapatkan hak paten su-

dah disebarluaskan. Pelaku UKM mengusulkan ke Dinas Koperasi-UKM dan diteruskan ke provinsi. Dari provinsi diajukan ke Kementerian Koperasi-UKM RI. Kalau semua persyaratan sudah lengkap, maka diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. "Masih banyak yang belum mencari hak paten. Upaya melalui sosialisasi kepada pelaku UKM mau mencari hak paten itu sudah dilakukan. Kami juga sudah sering menyebarkan informasi terkait alur dan prosedur sebelum mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Republik Indonesia," katanya.

Alasan mengapa pelaku UKM di daerah ini tidak tertarik mencari hak paten kata Swatantra, karena alur dan persyaratan mengurus hak paten itu belum dimengerti dengan baik. Pelaku UKM kebanyakan kesulitan biaya mencari hak paten itu. Terutama pelaku UKM dengan modal kecil, sehingga mereka tidak tertarik mencari hak paten yang sebenarnya memiliki fungsi penting itu. "Alasannya memang beragam. Paling dominan soal biaya. Selain itu, banyak yang tidak mendapat informasi lengkap soal prosedur dan syarat mencari hak paten itu," jelasnya.

Atas persoalan itu, pemerintah daerah setiap tahun memfasilitasi pelaku UKM, diusulkan dapat hak paten yang dibiayai pemerintah pusat. (kmb38)